

Pengaruh Demokratisasi terhadap Pembangunan Ekonomi di Rusia pada Masa Pemerintahan Boris Yeltsin

(The Impact of Democratization on Russian Economic Development in Boris Yeltsin Era)

Phita Crystalia Pramestiwi, Supriyadi, Adhiningasih Prabhawati
Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan-Kampus Tegalboto 37 Telp.(0331) 335586-331342, Fax. (0331)335586
Jember 68121 E-mail: fisip@unej.ac.id

Email Penulis: 1) pramesti_phyta2@yahoo.com 2) supriyadi_fisipunej@ymail.com 3) adh1n1n6.w@gmail.com

Abstract

In Boris Yeltsin era, Russia was in transition toward democracy through democratization process. In Russian democratization process, the economic and political transition happened simultaneously. Directly, democratization has impact on Russian economic development. This research aimed to analyze the impact of democratization on economic development in Russia, in order to answer the question how democratization gave impact on Russian economic development. The research used qualitative method within library research and descriptive analysis. However, it was proved in the research that Russian democratization through dual transition led to instability condition. In the instability condition, Russian economic could not grow rapidly seen from the decline of Russian economy and went toward economic crisis in 1998.

Key words: *democracy, democratization, dual transition, economic development*

A. PENDAHULUAN

Pada dewasa ini, demokrasi tampaknya menjadi topik hangat yang diperbincangkan dan diperdebatkan dalam kajian ilmu hubungan internasional. Demokrasi hangat diperbincangkan sebagai suatu sistem atau prinsip maupun nilai yang saat ini paling banyak dipilih serta diimplementasikan oleh negara-negara di dunia. Hal itu ditunjukkan dengan munculnya gelombang demokratisasi yang melanda dunia dan semakin meluas memasuki abad ke-20.

Pada abad ke-20, demokratisasi hadir seperti virus dan menjadi sebuah tren yang mengalami penyebaran secara global. Perkembangan luar biasa tersebut tercatat seperti pada *Human Development Report 2002 (Deepening Democracy in a Fragmented World)* dimana pada tahun 1985 hanya 8% negara-negara yang memiliki demokrasi yang matang, 38% negara-negara yang hampir demokratis dan kemudian pada tahun 2000, angka otoritarianisme turun menjadi 30%, negara-negara yang hampir demokratis meningkat pesat menjadi 57% dan yang berstatus demokrasi secara matang meningkat menjadi 11% (Suyatno, 2004).

Gelombang demokratisasi yang besar menandakan banyaknya negara yang mulai beralih menjadi negara yang menerapkan nilai-nilai demokrasi. Kemudian dalam perkembangan studi ilmu politik termasuk dalam kajian hubungan internasional, muncul sebuah perdebatan mengenai keterkaitan antara demokratisasi politik dan pembangunan ekonomi. Perdebatan tersebut terkonsentrasi pada dua pertanyaan besar yaitu dapatkah pertumbuhan ekonomi mendorong demokratisasi politik atau sebaliknya

dapatkah demokratisasi politik memacu pertumbuhan ekonomi? (Susanto, 1990)

Dalam kasus sejumlah negara Asia seperti Singapura dan Thailand menunjukkan bahwa lajunya pertumbuhan ekonomi tidak otomatis menghasilkan sistem politik yang demokratis. Hal tersebut menunjukkan lajunya pertumbuhan atau pembangunan tidak dipengaruhi oleh keberadaan demokratisasi di suatu negara. Pada sisi yang lain, terdapat pernyataan bahwa adanya korelasi positif antara pembangunan ekonomi dan demokratisasi politik. Hal tersebut dapat dilihat dari kemajuan perekonomian negara-negara Eropa Barat dan Amerika Utara setelah terciptanya iklim demokrasi. Meskipun terdapat dua sisi perbedaan pendapat tersebut, saat ini demokrasi menjadi sistem atau cara yang banyak dipilih negara-negara di dunia untuk diaplikasikan dan dipercaya dapat membawa ke arah positif bagi pembangunan ekonomi. Oleh sebab itu, banyak negara-negara yang kemudian melakukan demokratisasi termasuk Rusia.

Sepanjang sejarah Rusia, masa pemerintahan Boris Yeltsin dikenang sebagai sebuah masa yang dilematis dan dramatis. Setelah sekian lama berada dalam pemerintahan yang bersifat otoriter dan totaliter yang dimulai dari masa pemerintahan Tsar hingga Komunis, akhirnya Rusia bertransformasi dengan wajah yang baru. Demokratisasi telah membawa perubahan-perubahan yang drastis dalam pemerintahan dan politik seta pada sektor ekonomi. Yeltsin meyakini bahwa dengan adanya proses demokratisasi dimana dibangunnya iklim demokrasi di Rusia tersebut akan dapat membawa kemajuan dalam pembangunan ekonomi Rusia.

Namun membangun demokrasi dan ekonomi yang mantap di suatu negara yang sedang bertransisi tidak mudah. Dalam perkembangannya, perekonomian Rusia mengalami pertumbuhan yang tidak optimal dan cenderung mengalami penurunan di Rusia. Hal tersebut jauh dari yang diharapkan oleh Yeltsin dan hadirnya krisis mempengaruhi kepercayaan masyarakat pada pemerintahan Yeltsin. Idealnya keberadaan demokratisasi diiringi dengan pertumbuhan ekonomi yang positif seperti yang terjadi di Eropa Barat dan Amerika, namun kondisi tersebut berbeda dengan di Rusia masa pemerintahan Yeltsin. Fenomena proses demokratisasi yang justru tidak membawa pengaruh pada kemajuan pembangunan ekonomi tersebut menarik untuk dikaji lebih dalam.

Dengan latar belakang tersebut, maka muncul permasalahan yaitu, bagaimana proses demokratisasi dengan transisi ganda yang dilaksanakan pada masa pemerintahan Boris Yeltsin berdampak pada pembangunan ekonomi di Rusia? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan perkembangan proses demokratisasi di Rusia selama masa pemerintahan Yeltsin. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari pelaksanaan demokratisasi terhadap pembangunan ekonomi di Rusia.

B. KERANGKA PEMIKIRAN

Dalam menganalisa suatu permasalahan, maka dalam sebuah penelitian diperlukan kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran diturunkan dari beberapa teori atau konsep yang digunakan untuk membantu menjawab permasalahan. Definisi konsep menurut Mochtar Mas'od adalah abstraksi yang mewakili suatu objek, sifat suatu objek, atau suatu fenomena tertentu. Konsep sebenarnya adalah sebuah kata yang melambangkan suatu gagasan. (Mas'od, 1990).

Sementara definisi teori menurut Charles A. Mc. Clelland dan Segel yaitu, serangkaian *statement* yang saling berkaitan, yang terdiri dari; 1. Kalimat-kalimat yang memperkenalkan istilah-istilah yang merujuk pada konsep-konsep dasar teori itu. 2. Kalimat-kalimat yang menghubungkan konsep dasar itu satu sama lain. 3. Kalimat-kalimat yang menghubungkan beberapa *statement* teoritis itu dengan sekumpulan kemungkinan objek pengamatan empiris (hipotesis) (Mas'od, 1990).

Dalam penelitian ini, untuk menjawab permasalahan yang ada, maka digunakan teori ekonomi politik serta konsep demokratisasi, transisi ganda dan pembangunan ekonomi.

Pendekatan teori ekonomi politik

Menurut Dwight Y. King, teori ekonomi politik adalah sebuah alat analisis yang menitik beratkan pada kekuasaan politik sebagai variabel dominan dimana menurut pengamatannya tertuju pada segi-segi politik yang mengubah aspek-aspek ekonomi (Gilpin, 1987). Sementara itu menurut Gilpin teori ekonomi politik yaitu;

faktor ekonomi memainkan peranan penting dalam sejarah hubungan internasional. Faktor seperti tujuan ekonomi, sumber bahan baku, sumber daya, dan

kebijaksanaan luar negeri menjadi elemen dasar yang signifikan dalam setiap tindakan politik (Gilpin, 1987).

Pada sisi lain, kebijakan ekonomi dihasilkan dari proses persetujuan politik dimana terdapat persaingan dari kelompok-kelompok kepentingan ataupun elit di dalamnya. Pada dasarnya faktor politik dan ekonomi merupakan faktor yang selalu saling melengkapi, saling terkait dan bersifat resipokral (Isaak, 1995). Dalam sebuah kehidupan bernegara keduanya merupakan faktor yang tidak dapat dihindari. Terdapat hubungan kausalitas antara kedua faktor tersebut dimana satu faktor dapat mempengaruhi faktor lainnya.

Rusia sedang berada dalam kondisi menjalankan proses demokratisasi yang ikut memberikan pengaruh pada pembangunan ekonominya. Proses demokratisasi yang membawa perubahan-perubahan drastis baik dalam kehidupan politik dan ekonomi Rusia. Perubahan dari sistem yang dulunya begitu tertutup dan terpusat bahkan bersifat totaliter (pada masa Soviet dengan pemerintahan Stalin) menjadi lebih demokratis atau terbuka di masa Yeltsin (Fahrurodji, 2005).

Kemudian berjalannya proses demokratisasi tersebut pada akhirnya membawa perubahan radikal dalam struktur dan sistem serta arah kebijakan baik ekonomi maupun politik. Dengan perubahan dalam perpolitikan yang lebih terbuka akibat penerapan demokrasi tentunya ikut mengubah corak dan sistem ekonominya.

Demokratisasi

Menurut Robert Dahl berarti proses perubahan rezim otoriter (hegemoni tertutup) yang tidak memberi kesempatan pada partisipasi dan liberalisasi menuju poliarkhi yang di dalamnya memberikan derajat kesempatan partisipasi dan liberalisasi yang tinggi (Dahl, 1971). Untuk dapat menerapkan demokrasi yang mantap maka perlu melalui proses atau tahapan demokratisasi.

Dalam proses demokratisasi terdapat 3 fase atau tahapan yang dilalui yaitu (Suyatno, 2004):

1. Fase transisi.
Transisi dimulai dari proses perpecahan hingga ambuknya rezim otoriter lama yang diikuti dengan pengesahan bentuk pemerintahan demokrasi atau kembalinya bentuk pemerintahan otoriter.
2. Fase instalasi disebut juga sebagai tahap persiapan dimana terjadi penginstalasian lembaga-lembaga politik dan aturan politik baru yang berada dalam payung demokrasi.
3. Fase konsolidasi merupakan sebuah proses yang mengurangi kemungkinan pembalikan demokratisasi. Struktur dan prosedur politik yang berlangsung selama proses transisi akan dimantapkan, diinternalisasikan dan bahkan diabsahkan dalam proses konsolidasi.

Pemerintahan Yeltsin berada tepat pada masa atau fase transisi yang ditandai dengan kejatuhan Rezim Komunis Soviet dan dibangunnya Rezim "Rusia Baru" dengan sistem politik yang demokratis. Naiknya Yeltsin sebagai tokoh pemegang kekuasaan di Rusia maka otomatis membawa demokrasi ke dalam kehidupan Rusia. Selanjutnya, Yeltsin

mencoba mengadopsi dan menginstalasi nilai-nilai demokrasi liberal.

Selama proses demokratisasi di Rusia terjadi kondisi transisi ganda dimana melakukan reformasi politik sekaligus reformasi ekonomi. Transisi ganda (*dual transition*) menurut Adam Przeworski adalah transisi dari varian otoritarianisme menuju berbagai model demokrasi, dan transisi dari sistem ekonomi yang dikelola negara, monopolistik, dan protektif menjadi sistem pasar bebas (Przeworski, 1991). Untuk membangun demokrasi dalam pemerintahan dan politik di Rusia, Yeltsin melakukan berbagai perubahan dengan serangkaian bentuk reformasi baik dalam politik pemerintahan maupun ekonomi. Dalam sistem politik pemerintahan Rusia diterapkan nilai-nilai demokratis. Sementara itu dalam ekonomi, proses demokratisasi tersebut telah mendorong terjadinya perubahan dalam sistem ekonomi Rusia. Sistem ekonomi Rusia mengalami transisi menjadi dari sistem ekonomi terencana dan terpusat menjadi sistem ekonomi pasar yang berbasis pada pasar bebas. Dalam sistem ekonomi pasar bebas, kegiatan-kegiatan dalam perekonomian sepenuhnya diatur oleh mekanisme pasar atau *invisible hand* (Sukirno, 2013). Sistem pasar bebas atau yang dikenal juga dengan sistem *laissez-faire* tersebut menekankan pada kebebasan sepenuhnya yang diberikan pada masyarakat untuk menentukan kegiatan ekonomi yang mereka inginkan (Prasetyo, 2011). Dalam hal ini, berarti peran negara dalam ekonomi tersebut menjadi sangat sedikit, terbatas bahkan tidak ada sama sekali. Dengan adanya demokratisasi melalui transisi ganda tersebut secara langsung berdampak pada pembangunan ekonomi.

Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menurut Sadono Sukirno mempunyai arti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Sukirno, 2002). Pembangunan ekonomi juga digunakan untuk menyebut pertumbuhan ekonomi dalam negara yang berkembang atau yang sedang membangun (Witjaksono, 2009). Indeks atau tolok ukur untuk mengamati pembangunan atau pertumbuhan perekonomian berdasarkan pada pendapatan nasional, tingkat inflasi, tingkat pengangguran atau penggunaan tenaga kerja serta neraca pembayaran dan kurs valuta asing. Melalui indikator-indikator tersebut maka laju pertumbuhan ekonomi dapat diukur.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian digunakan untuk membantu penulis untuk menganalisa dan menjawab suatu permasalahan. Metode penelitian sendiri dibagi ke dalam dua bagian, yaitu metode pengumpulan data dan metode analisis data.

Dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini penulis lebih condong untuk menggunakan studi kepustakaan (*Library Research*) dengan berbagai macam literatur yang dapat menunjang jalannya penulisan. Sehingga dalam hal ini penulis menggunakan sumber data sekunder di mana penulis

tidak turun langsung ke lapangan untuk mengadakan penelitian.

Untuk mendapatkan data yang valid dan mencukupi, penulis menggunakan beberapa pusat informasi seperti Perpustakaan pusat Universitas Jember, Ruang Baca FISIP Universitas Jember, Buku Koleksi Pribadi, Artikel, majalah, jurnal ilmiah dan Media internet. Karena penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari dokumen-dokumen, buku, jurnal dan surat kabar, maka analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif.

Metode deskriptif menurut Mohammad Nazir merupakan penelitian yang berupaya menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi dengan menggambarkan fakta-fakta dan memberikan data yang akurat dan tepat (Nazir, 1988). Dalam penulisan ilmiah ini, penulis berupaya menggambarkan hubungan atau pengaruh demokratisasi terhadap pembangunan ekonomi di Rusia pada masa pemerintahan Boris Yeltsin.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Rusia di awal pemerintahan Yeltsin berada pada masa transisi atau peralihan yang ditandai dengan ambruknya Rezim Komunis Uni Soviet dan berganti dengan Rezim Demokratis Rusia dibawah Pemerintahan Yeltsin. Selain, mengalami transisi rezim pemerintahan, di Rusia juga terjadi transisi dalam sistem politik dan ekonominya. Dalam sistem politik di Rusia terjadi peralihan dari sistem politik yang otoriter dan tutup menuju sistem politik yang demokratis dan terbuka. Kemudian dalam sistem ekonominya terjadi peralihan dari sistem ekonomi terpusat dan terencana menuju sistem ekonomi pasar bebas. Transisi ganda yang dijalankan di Rusia merupakan bagian dari perjalanan proses menuju demokrasi atau demokratisasi. Proses demokratisasi yang ditandai dengan perubahan drastis dalam bidang politik dan bidang ekonomi tersebut dibangun dalam landasan nilai-nilai demokrasi yang mengedepankan kebebasan, partisipasi dan kompetisi. Instalasi nilai-nilai demokrasi tersebut dilihat dari proses reformasi Rusia yang digalakkan Yeltsin.

Dalam bidang politik misalnya, masyarakat dapat menikmati berbagai bentuk kebebasan baik kebebasan dalam berpolitik, beragama, berorganisasi dan lain sebagainya. Kebebasan yang dulunya begitu terbatas pada masa Uni Soviet. Kemudian dalam sistem dan bentuk pemerintah Rusia direformasinya bentuk pemerintah dengan sistem pembagian kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Hal tersebut sesuai dengan kaidah pembagian kekuasaan atau yang dikenal dengan *trias politica* (Budiardjo, 2010). Selain itu, untuk memilih orang-orang yang duduk dalam pemerintahan di Rusia, telah menggunakan sistem pemilu baik untuk pemilihan presiden maupun parlemen yang melibatkan banyak partai. Hal tersebut menunjukkan bahwa di Rusia tidak lagi hanya satu partai yang berkuasa, namun semua partai memiliki kesempatan untuk berkompetisi dalam memperebutkan kekuasaan dalam kursi parlemen. Selain itu, wanita juga memiliki kesempatan untuk berpartisipasi politik. Hal tersebut terbukti dengan munculnya *Women's Party* di Rusia (Ko, 2011). Selanjutnya, perubahan-perubahan baik dalam sistem dan kehidupan politik di Rusia diikuti dengan

perubahan konstitusi. Perubahan Konstitusi Rusia yaitu dari konstitusi 1997 yang merupakan warisan Uni Soviet yang amandemen pada 12 Desember 1993 tersebut, semakin memantapkan tujuan Rusia ke arah pemerintahan yang demokratis dan meninggalkan pengaruh dari rezim Komunis Uni Soviet terdahulu.

Kemudian dalam bidang ekonomi, Yeltsin melakukan perubahan dalam sistem ekonomi dan kebijakan ekonomi di Rusia. Sistem perkonomian Rusia mengalami reformasi menuju sistem perekonomian pasar. Dalam sistem ekonomi pasar, pemerintah tidak banyak ikut campur dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi. Hal tersebut berarti masyarakat Rusia dibebaskan untuk berkompetisi dalam perkonomian.

Untuk dapat menciptakan sistem ekonomi pasar dalam waktu yang singkat maka Yeltsin menerapkan kebijakan model terapi kejut atau *shock therapy*. Program dari kebijakan tersebut adalah liberalisasi harga dan perdagangan internasional, kebijakan stabilisasi ekonomi serta privatisasi atau swastanisasi perusahaan negara (Adelina, 2009). Kemudian dalam kebijakan ekonomi Rusia, Yeltsin lebih terbuka terhadap hubungan ekonomi dengan Barat khususnya Amerika Serikat. Dalam membangun ekonomi Rusia bahkan Yeltsin meminta bantuan dan pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan Internasional yang mayoritas dibawah pengaruh Amerika Serikat (Alkatiri, 2007). Dengan proses demokratisasi di Rusia yang melalui dua transisi sistem yang dilakukan dalam waktu bersamaan tersebut berdampak pada munculnya kondisi ketidakstabilan baik dalam politik maupun ekonomi.

Ketidakstabilan Ekonomi

Transisi sistem ekonomi Rusia menuju sistem ekonomi pasar tampaknya menimbulkan kondisi ketimpangan sosial, ketidakstabilan pertumbuhan ekonomi dan munculnya monopoli. Sistem ekonomi pasar yang berlandaskan pada mekanisme pasar justru menimbulkan kondisi ketimpangan sosial dimana mayoritas masyarakat Rusia mengalami kemiskinan, di sisi lain terdapat kelompok kecil yang menikmati kekayaan dan memanfaatkan peluang dalam sistem ekonomi pasar. Kelompok tersebut adalah para oligarki. Mereka memonopoli perekonomian Rusia dan menjadikan kekuatan ekonomi sebagai kekuatan politik yang nantinya akan menjamin kekayaan yang akan terus mereka peroleh (Mehdi, 2013). Selain itu juga muncul ketidakstabilan ekonomi yang ditunjukkan dari naik turunnya statistik (dengan cenderung menurun) selama proses transisi ekonomi tersebut berlangsung yang disebabkan oleh berbagai faktor.

Faktor-faktor yang menimbulkan ketidakstabilan ekonomi tersebut yang pertama adalah lemahnya investasi. Pada dasarnya investasi sangat dibutuhkan untuk dapat meningkatkan produksi dalam kegiatan ekonomi yang secara langsung berpengaruh pada pembangunan ekonomi. Hampir semua ahli ekonomi menekankan arti pentingnya pembentukan investasi sebagai penentu utama (Prasetyo, 2011).

Investasi adalah modal bagi penggerak roda perekonomian. Tanpa investasi maka tidak adanya modal untuk memulai dan menggerakkan industri. Apabila

investasi mengalami kemerosotan seperti yang terjadi di Rusia maka secara langsung berdampak pada kemerosotan hasil industri dan pendapatan nasional. Pentingnya investasi dalam sistem ekonomi pasar tersebut telah disadari oleh Yeltsin dan kabinetnya. Oleh sebab itu, dalam proses reformasi menuju sistem pasar dijalankan dengan kebijakan model terapi kejut dimana terdapat program swastanisasi atau privatisasi.

Dalam program swastanisasi Rusia, Yeltsin membagikan saham perusahaan negara kepada masyarakat Rusia dalam bentuk *voucher* yang bertujuan agar masyarakat Rusia dapat berpartisipasi dalam mengelola perusahaan negara dan menikmati keuntungan dari hasil perusahaan yang dijalankan bersama tersebut. Namun dalam perkembangannya, proses swastanisasi juga tidak berdampak signifikan dalam mempengaruhi tingkat investasi.

Lemahnya investasi di Rusia disebabkan oleh pembagian saham yang lebih besar diberikan kepada orang dalam perusahaan seperti pekerja dan manajer (Komulainen, 2000). Orang-orang dalam perusahaan seperti para pegawai dan manajer tersebut memiliki sebagian besar dari industri dan hampir semua pertanian serta pelayanan jasa dalam skala kecil. Mereka mendapatkan kepemilikan tersebut dari program swastanisasi yang dijalankan Yeltsin dimana para pegawai memiliki lebih dari dua pertiga saham dalam perusahaan negara. Hal tersebut awalnya dilakukan agar jalannya industri tidak terpengaruh dan swastanisasi dapat terkontrol. Namun, dengan perusahaan Rusia nyatanya masih berpegang kepada kepemilikan orang dalam tersebut produksi tidak semakin meningkat.

Kurangnya pengalaman terdahulu mengenai teori kerangka kerja pembangunan yang baik mempengaruhi karakteristik orang dalam perusahaan. Karakteristik orang dalam yang merupakan warisan dari Uni Soviet tersebut, antara lain yaitu (Komulainen, 2000), pertama orang dalam perusahaan tersebut menggunakan aturan kepemilikannya lebih sebagai jaminan pekerjaan atau kekuasaan daripada sebagai manajemen aset. Kedua, orang dalam tersebut kurang dapat berinvestasi dan bahkan takut mengambil kredit bank. Selain itu, mereka sering berperilaku negatif terhadap pemegang kekuasaan atau saham diluar dari orang-orang dalam tersebut. Jadi, meskipun sistem sudah diubah namun struktur orang-orang yang pengelolanya tetap maka hasilnya sama saja.

Selanjutnya, lemahnya investasi disebabkan juga oleh adanya praktek kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan para oligarki. Kepemilikan perusahaan-perusahaan negara tidak hanya dimiliki oleh orang dalam perusahaan warisan Uni Soviet tapi juga beberapa perusahaan dimiliki oleh para oligarki. Oligarki adalah kelompok kecil pengusaha baru yang dekat dengan pemerintah dan menguasai sebagian besar saham perusahaan negara yang telah diswastanisasi. Sebagian kepemilikan saham tersebut diperoleh dengan membeli saham-saham yang berupa *voucher* di masyarakat umum dengan harga yang jauh dari nilai saham itu sendiri. Penjualan saham tersebut legal karena memang tidak ada aturan yang melarang penerima *voucher* saham untuk tidak menjual kembali saham tersebut pada pihak lain.

Kelompok Oligarki ini juga dapat mengambil keuntungan dari adanya sistem liberalisasi harga. Mereka

yang mengelola perusahaan industri dimana penentuan harga dibebaskan, menerima subsidi dan kredit dari Pemerintah Sentral Rusia (McFaul, 1995). Dengan adanya bantuan dari pemerintahan tersebut mereka dapat menurunkan biaya produksi. Selanjutnya mereka menjual hasil produksinya dengan harga yang tinggi di dalam pasar bebas. Selain itu, hasil keuntungan yang seharusnya dapat menjadi modal bagi pelaksanaan dan pengembangan produksi malah di investasikan ke luar negeri atau dikenal dengan *capital flight* (pelarian modal). Pelarian modal Rusia secara kumulatif pada 1992-1997 berkisar antara 60 milyar USD-150 milyar USD, atau kira-kira 10 sampai 25 miliar USD per tahun (Cooper, 2000). Hal tersebut yang membuat para oligarki semakin kaya sementara sebagian besar Rakyat Rusia mengalami kemiskinan.

Banyak kecurangan dan pelanggaran serta monopoli dalam ekonomi Rusia yang dilakukan oleh oligarki tersebut disebabkan oleh lemahnya aturan dari pemerintah yang dapat melindungi dan mengawasi jalannya perekonomian. Selain itu, ketidak konsistenan kebijakan ekonomi pemerintah juga yang menyebabkan ketidakstabilan ekonomi Rusia.

Ketidakstabilan Politik

Kepincangan pelaksanaan kebijakan reformasi ekonomi tersebut disebabkan oleh masih terjadi penggabungan dalam pembuatan keputusan politis dan ekonomis yang tidak hanya tampak pada level negara federal tapi menyebar hingga tingkat regional dan lokal. Ketidakstabilan ekonomi dipicu oleh lemahnya pemerintah Yeltsin. Suatu negara atau pemerintahan yang kuat dalam konteks negara pembangunan yang demokratis adalah negara yang mempunyai kapasitas yang kuat dalam menegakkan *rule of law*, untuk menjamin hukum dan tata tertib, mencapai tujuan-tujuan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan secara berkelanjutan dan penyelenggaraan pemerintahan dikelola dengan bersih.

Lemahnya pemerintah Rusia tersebut akibat adanya transisi sistem politik yang lebih demokratis. Adanya kebebasan dan perluasan partisipasi politik yang berdampak pada munculnya ketidakstabilan politik justru mengarah pada lemahnya pemerintah Rusia. Ketidakstabilan politik di Rusia selama pemerintahan Yeltsin tersebut disebabkan oleh adanya konflik elit. Keberadaan kelompok konservatif yang tetap bertahan dalam parlemen dengan kuatnya partai Komunis dalam pemilihan Parlemen menjadi sebuah rintangan tersendiri bagi proses reformasi yang dijalankan pemerintahan Yeltsin. Kelompok konservatif selalu mengawasi pemerintahan Boris Yeltsin dan selalu berlawanan dengan kebijakan serta tidak mendukung setiap kebijakan reformasi yang dilakukan Yeltsin (McFaul, 1995). Keinginan kelompok konservatif tidak sejalan dengan keinginan dan cita-cita Presiden Boris Yeltsin. Oleh sebab itu, proses stabilitas politik menjadi ikut terganggu dan aksi bersama antar pemerintah tidak dapat berjalan.

Selanjutnya, faktor yang juga mempengaruhi ketidakstabilan politik adalah bobroknya moral para birokrat. Hal tersebut tampak dari maraknya korupsi dan kasus penggelapan pajak yang melibatkan oknum-oknum pejabat negara dan para oligarki. Terlebih dengan hadirnya

oligarki dalam politik dan pemerintahan di Rusia ikut menyumbang kekacauan dan kestabilan negara. Tercipta pola ganda dimana para oligarki yang memiliki kekayaan memiliki kesempatan lebih luas dalam memperoleh jabatan penting dalam suatu lembaga pemerintahan Rusia. Kemudian dengan memegang posisi penting tersebut, mereka bisa memenangkan kontrak-kontrak pemerintah, lisensi, dan preferensi untuk perusahaan mereka guna menumpuk kekayaan (Mehdi, 2013).

Kondisi ketidakstabilan baik dalam ekonomi maupun politik yang dipengaruhi oleh proses demokratisasi dengan transisi ganda tersebut berdampak langsung pada pelaksanaan pembangunan ekonomi di Rusia. Proses demokratisasi yang diwarnai oleh ketidakstabilan tersebut secara tidak langsung berdampak pada terhambatnya pembangunan ekonomi di Rusia. Pembangunan ekonomi di Rusia cenderung mengarah pada penurunan dan krisis. Hal tersebut ditandai dengan menurunnya pendapatan negara atau GDP Rusia pada era Yeltsin dari tahun 1992-1999. Pendapatan Nasional negara yang diukur melalui PDB (GDP) semakin mengalami penurunan bertahap sejak dicanangkannya program privatisasi atau swastanisasi di tahun 1992. Kondisi tersebut terus berlangsung hingga akhirnya di tahun 1998 Rusia berada pada kondisi krisis. Diperkirakan pada tahun 1991-1998 GDP Rusia mengalami penurunan 42-43% (Cooper, 2000). Hal tersebut disebabkan oleh hasil produksi dari agrikultur yang turun 44% dan produksi industri menurun 54%. Terdapat masa dimana perdagangan Rusia mengalami peningkatan sebesar 16.5% pada Oktober 1995 hingga Januari 1997 (Wiel, 2013). Namun kemudian mengalami kemerosotan 37% hingga Desember 1998 akibat adanya Krisis Asia.

Kemudian awal masa pemerintahan Yeltsin masih dibayang-bayangi oleh besarnya tingkat inflasi di dalam negeri. Tingkat inflasi sempat mengalami penurunan hingga mencapai 10,99% pada Desember 1997 (Inflation.eu, 2010). Namun menyusul dengan terjadinya defisit neraca anggaran pembayaran dimana pendapatan ekspor lebih kecil daripada import maka kebijakan devaluasi diambil sebagai langkah mengatasi defisit tersebut. Akibat dari pendapatan yang terus menurun dan lemahnya investasi serta kebijakan stabilisasi yang tidak konsisten, tingkat inflasi kembali meningkat pada tahun 1998 dimana mencapai 84,47%.

Dengan kemerosotan produksi akibat lemahnya investasi beberapa perusahaan harus mengurangi biaya produksinya. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengurangi penggunaan tenaga kerja. Hal tersebut berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran di Rusia. Persentase jumlah pengangguran yang ada di Rusia terus meningkat sejak dijalankannya program privatisasi atau swastanisasi (Valvi, 2012).

Dengan perdagangan bebas membuat peredaran Dollar yang makin meluas dan berdampak pada nilai Rubel semakin lemah dan memperbesar tingkat inflasi di Rusia. Jatuhnya nilai nilai tukar Rubel terhadap Dollar yang semula 1 Dollar senilai 6 Rubel menjadi 20-25 Rubel untuk satu Dollar pada tahun 1998-1999 (Wiel, 2013). Pada tahun 1998, nilai mata uang Rusia turun hingga 70 persen menyebabkan 29 persen penduduk Rusia hidup di bawah garis kemiskinan. Kondisi-kondisi tersebut memuncak

menjadi krisis keuangan nasional yang melanda Rusia pada tahun 1998 (Novianti, 2008). Pembangunan ekonomi yang kemudian semakin memburuk dibarengi dengan utang negara Rusia yang semakin besar. Total perkiraan jumlah hutang Rusia yang belum mampu dilunasi oleh Pemerintah Yeltsin mencapai 150 miliar USD (Alkatiri, 2007). Pada tahun 1998, statistik sosial menunjukkan kondisi Rusia lebih buruk yang ditandai oleh besarnya pertumbuhan kemiskinan. Hal tersebut menandakan besarnya kesenjangan sosial dan kesejahteraan yang tidak merata di Rusia. Meningkatnya kemiskinan dan kesenjangan di Rusia pada masa Yeltsin dibanding masa pemerintahan Soviet. Hal tersebut dilihat dari perbandingan tingkat kemiskinan di Rusia pada tahun 1989 tercatat hanya 2%, namun di tahun 1998 jumlahnya mencapai 23,8% (Schwarz, 1998).

Kondisi krisis ekonomi Rusia tersebut akhirnya ikut merembet pada krisis politik dan legitimasi pemerintahan Yeltsin. Munculnya aksi-aksi demonstrasi yang dilakukan oleh para pekerja diakibatkan oleh upaya Yeltsin yang tak mampu memperbaiki krisis yang memuncak. Banyak media baik nasional maupun internasional yang ikut mengkritisi pemerintahan Yeltsin yang membawa kehancuran Rusia. Hingga akhirnya pada Desember 1999, Yeltsin mengundurkan diri dari jabatannya dan digantikan oleh Putin.

E. KESIMPULAN

Pada masa Boris Yeltsin, Rusia berada dalam masa transisi menuju demokrasi. Selama proses demokratisasi di Rusia terjadi transisi ganda dimana dilakukan perubahan-perubahan atau reformasi baik dalam sistem politik maupun ekonomi. Namun adanya transisi ganda tersebut justru menimbulkan ketidakstabilan dalam ekonomi dan politik. Dengan kekacauan dan ketidakstabilan yang melanda selama proses demokratisasi transisi ganda seperti yang terjadi di Rusia akhirnya berimbas pada pembangunan ekonomi yang tidak teguh di Rusia.

Kondisi ekonomi Rusia secara garis besar justru mengarah kepada kemunduran pertumbuhan ekonomi. Kemunduran pertumbuhan ekonomi ditunjukkan dengan turunnya tingkat GDP atau pendapatan negara, besarnya tingkat inflasi dan meningkatnya jumlah pengangguran di Rusia selama pemerintahan Yeltsin. Keadaan tersebut semakin diperparah dengan jumlah utang luar negeri Rusia. Puncaknya terjadi krisis ekonomi yang parah di tahun 1998.

F. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adelina, M. D. 2009. *Sentralisme Demokratik Vladimir Putin dalam Mengatasi Krisis Ekonomi di Federasi Rusia (2000-2008)*. Jakarta: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia.
- Alkatiri, Zefry. 2007. *Transisi Demokrasi di Negara Federasi Rusia: Analisis Perlindungan HAM 1991-2000*. Jakarta: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.

- Budiardjo, M. 2010. *Dasar-dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Cooper, W. H & Hardt, J. 2000. *Russian Capital Flight, Economic Reforms, and U.S. Interests: An Analysis*. CRS Web: Congressional Research Service.
- Fahruroddji, A. 2005. *Rusia Baru Menuju Demokrasi: Pengantar Sejarah dan Latar Belakang Budayanya*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Gilpin, R. & Jean, M. 1987. *The Political Economy of International Relation*. Princeton University Press.
- Isaak, Robert. A. 1995. *Ekonomi Politik Internasional*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana.
- Ko, Sangtu. 2011. *Democratic Consolidation and the Political Parties in Russia*. Seoul: Hanyang University.
- Komulainen, T. and Korhinen, L. 2000. *Russian Crisis and Its Effects*. Helsinki: Kikumora Publications.
- Mas'ood, M. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES.
- Mehdi, A. & Yenikieff, S. 2013. *Governors, Oligarchs, and Siloviki: Oil and Power in Russia*. Russia: NIS Center
- Nazir, M. 1988. *Metode penelitian*. Jakarta: Gahalia Indonesia.
- Prasetyo, P. E. 2011. *Fundamental Makro Ekonomi*. Edisi 1 Cetakan Kedua. Yogyakarta: Beta Offset.
- Przeworski, Adam. 1991. *Democracy and The Market: Political and Economic Reform in Eastern Europe and Latin America*. New York: Cambridge University Press.
- Sukirno, Sadono. 2013. *Mikroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Internet:

- Inflation.eu: Worlwide Inflation Data. 2010. *Historic of Russian Inflation (CPI)*. <http://www.inflation.eu/inflation-rates/russia/historic-inflation/cpi-inflation-russia.aspx> [8 Juni 213]
- Novianti, Nenden. & Solahuddin, E. 2008. *Yeltsin mengundurkan diri*. http://dunia.news.viva.co.id/news/read/18613-boris_yeltsin_mengundurkan_diri [17 November 2013]
- McFaul, M. 1995. *State Power, Institutional Change, and the Politics of Privatization in Russia*. World Politics. Vol. 47, No. 2. <http://www.jstor.org/stable/2950651> [8 Juni 2013]
- Schwarz, P. 1998. *A balance sheet of the Yeltsin era*. <http://www.wsws.org/en/articles/1998/09/yelt-s09.html> [24 Januari 2014]
- Wiel, I. V. D. 2013. *Economic Report: The Russian Crisis 1998*. <https://economics.rabobank.com/publications/2013/sepember/the-russian-crisis-1998/> [27 Januari 2014]
- Witjaksono, Mit. 2009. *Pembangunan Ekonomi dan Ekonomi Pembangunan: Telaah Istilah dan Orientasi dalam Konteks Studi Pembangunan*, JESP Vol. 1.

http://www.fe.um.ac.id/wp-content/uploads/jesp.2009/MIT_W-PEEP.htm [14
April 2013]









